

Jurnal

Strategi Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Investasi Di Provinsi Riau Tahun 2009-2011

AURORA ADEREINY

Dosen Pembimbing : Wan Asrida

Jl. Medang No.2

Email : aurora.adereiny@yahoo.com

085271224422

Abstrak

Peningkatan investasi di Provinsi Riau kurun waktu 2007-2011 menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau. Kegiatan investasi itu tentu saja didukung oleh ketersediaan sumberdaya (alam dan manusia) sehingga investasi meningkat, namun peningkatan kegiatan investasi itu belum didukung oleh ketersediaan sarana transportasi jalan, air dan udara yang memadai dan berdampak luas pada percepatan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Selain itu, peningkatan kegiatan investasi ternyata belum didukung oleh kinerja organisasi dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, hal tersebut dilihat dari beberapa tugas yang belum terlaksana dengan baik oleh BPMPD selaku institusi yang diberi wewenang mengelola kegiatan investasi dan promosi potensi daerah.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas BPMPD adalah hambatan rendahnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, minimnya anggaran, kurangnya koordinasi antar institusi baik horizontal maupun vertikal serta kurangnya penerapan teknologi dan sistem informasi. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPMPD dilakukan melalui dua cara (1) peningkatan program/kegiatan yang disusun dalam rencana kerja badan yang terdiri dari 12 (dua belas) item kegiatan, (2) peningkatan kapasitas aparatur pada BPMPD melalui 3 (tiga) kegiatan pokok. Selain itu, masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh BPMPD yaitu masih adanya *image* negatif dari kalangan investor asing terhadap kondisi kamtibmas dan sosial politik di Indonesia.

Keyword; Investasi, Promosi, Hambatan dan Upaya.

Investment increasing in Riau Province period 2007-2011 becomes a fresh wind to the economic growth of the county. Investment activity is supported by the availability of resources (natural and human) surely, so that investment increases, but the investment increasing activity have been not supported by the availability of road transport, water and air adequately and far-reaching impact on economic growth across the region in the Riau province. In addition, investment increasing activity is not yet supported by the performance of the Board of Investment and Promotion Area organization, it's seen from some of the tasks that have been not done as well by

BPMPD institution which is authorized to manage the investment and promotion potential of the region activity.

The constraints in the implementation of the task is the low quality of the human resources personnel, lack of budget, lack of coordination among institutions both horizontally and vertically, and the lack of application of technology and information systems.

While efforts is made by BPMPD is done in two ways: (1) improvement programs / activities in the board's work plan prepared which is composed of twelve (12) items of activities, (2) increasing the capacity of the apparatus on BPMPD through three (3) activities principal. In addition, there are still barriers and problems which are faced by the BPMPD. That is negative image of foreign investors against kamtibnas and political social conditions in Indonesia.

keywords; Investment, Promotion, Barriers and Efforts.

Latar Belakang

Studi ini ingin melihat persoalan penanaman modal dan promosi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai tujuan dari pelaksanaan pembangunan di daerah. Investasi (penanaman modal) dan promosi merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi baik dalam skala lokal maupun nasional. Upaya kegiatan penanaman modal di daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan diperlukan dalam rangka menunjang percepatan peningkatan pembangunan ekonomi, mengingat kegiatan penanaman modal merupakan akselerator peningkatan lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat menuju ekonomi bangsa yang mandiri.

Geliat perekonomian suatu daerah tidak bisa dipisahkan dari *capacity building* dengan melibatkan dunia usaha di dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi keuangan bagi daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan investasi di daerah pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langka strategis dalam bentuk regulasi maupun promosi.

Berkenaan dengan pengembangan geliat ekonomi daerah itu, maka Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau sebagai lembaga yang dilimpahkan wewenang oleh Gubernur Riau untuk mengurus masalah penanaman modal dan promosi potensi daerah bertanggungjawab terhadap peningkatan investasi (penanaman modal) kepada Gubernur Provinsi Riau sebagaimana tugas fungsi dan kedudukannya.

Berikut Realisasi jumlah investasi PMDN di Provinsi Riau selama lima tahun terakhir:

Tabel 1.1. Realisasi Jumlah PMDN di Provinsi Riau Dalam 5 (lima) Tahun

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011
Rp (Milyar)	3,095.30	1,966.80	3,386.60	906.90	7,500.00

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012

Sedangkan realisasi penanaman modal asing dalam lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2. Realisasi Jumlah PMA di Provinsi Riau Dalam 5 (lima) Tahun

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011
Juta US\$	724.00	460.90	251.4	86.6	212.3

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012

Peningkatan investasi di Provinsi Riau itu didukung oleh potensi daerah Riau yang memiliki letak strategis yang berada di selat malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional dan memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah terutama disektor pertanian/perkebunan, pertambangan, perternakan serta perikanan dan kelautan kemudian didukung jumlah angkatan kerja yang besar dan iklim investasi yang kondusif serta komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk penciptaan iklim investasi kondusif, pengembangan penanaman modal dan promosi daerah

Kinerja organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dalam bidang penanaman modal dan promosi daerah juga belum berjalan dengan baik dan tentunya berdampak pada minat investor untuk menanamkan modalnya di Riau. Hal ini ditandai dengan belum terlaksananya beberapa tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Provinsi Riau. Adapun tugas-tugas yang belum terlaksana itu diantaranya; tugas dalam melaksanakan pelatihan dibidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah, tugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah, tugas dalam merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi Daerah, tugas dalam mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan perencanaan promosi seluruh potensi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan tugas dalam menyusun rencana kerja dan program pembangunan di bidang

penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah serta tugas dalam melaksanakan rencana kerja program pembangunan di bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah

Perumusan Masalah

Kegiatan investasi yang mengundang investor sebagai pemain utama dalam geliat ekonomi tentunya harus ditunjang oleh kondisi sosio politik dan keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) berperan meyakinkan investor bahwa kondusifitas daerah Riau sangat baik sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat dari investor untuk menanamkan modal dan berusaha di Provinsi Riau.

Berdasarkan hal itu, maka pertanyaan penelitian ini adalah; Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau dalam meningkatkan investasi di Provinsi Riau tahun 2009-2011? Dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau dalam meningkatkan investasi di Provinsi Riau tahun 2009-2011?

Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau dalam meningkatkan investasi di Provinsi Riau tahun 2009-2011 dan untuk mengetahui upaya-upaya Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau dalam meningkatkan investasi di Provinsi Riau tahun 2009-2011.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah menjadi informasi bagi pihak terkait khususnya Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau tentang kondisi investasi di luar kondisi statistik yang tercatat di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau serta diharapkan menjadi acuan dalam membuat pedoman kebijakan terkait dengan investasi dan

promosi daerah Riau ke depannya dan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya yang membahas pada permasalahan yang sama dan diharapkan dapat menjadi peningkatan khasanah keilmuan khususnya di jurusan Ilmu Pemerintahan dalam mata kuliah Kebijakan Pemerintahan dan Pemerintahan Dan Politik Lokal serta Mata Kuliah Organisasi dan Manajemen Pemerintahan.

Kerangka Berfikir

a. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye, mendefinisikan kebijakan publik sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baginya, kebijakan publik adalah pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melakukan (sesuatu) maupun untuk tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*)¹.

Kemudian Dye mengemukakan langkah-langkah yang harus dilalui dalam setiap kebijakan yaitu:²

1. Identifikasi masalah; pada dasarnya membicarakan rangkaian aktifitas mulai dari mendiskusikan apa-apa yang terjadi, melakukan penelitian, interpretasi data, mempersiapkan usulan-usulan/mendiskusikan secara mendalam, konsultasi dengan pihak-pihak di luar pemerintah mengembangkan usulan yang ada dan kemudian membangun strategi.
2. Formulasi/Perumusan kebijakan; merupakan tindak lanjut identifikasi masalah dalam mana hasil-hasil yang tidak dapat dirumuskan kembali dalam bentuk proposal dan strategi-strategi/persepsi yang dilakukan melalui inisiasi dan pengembangan proses formulasi kebijakan menyangkut juga interpretasi identifikasi. Oleh karena itu dalam tahap kedua evaluasi terhadap berbagai masalah yang timbul dapat dilakukan.
3. Legitimasi/Pengesahan Kebijakan; merupakan fase dimana proses tawar menawar kompetisi, persuasif diantara berbagai kelompok kepentingan dalam pejabat pemerintah.

¹ Thomas R. Dye dalam Affan Sulaeman. 1998. *Diktat Kebijakan Pemerintah*, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad – IIP: Bandung, hal 4

² *Ibid.*, hal 4

4. Implementasi kebijakan; pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi yang terorganisasi, pengeluaran publik serta aktifitas-aktifitas agen eksekutif.
5. Evaluasi Kebijakan; tahap penilaian terhadap kebijakan yang dianggap perlu maka pengulangan kembali dalam proses pembuatan kebijakan.

b. Koordinasi

Menurut James D. Mooney koordinasi adalah susunan yang teratur (*orderly arrangement*) dari usaha kelompok (*group effort*), untuk menciptakan kesatuan tindakan (*unity of action*) dalam mengejar (*pursuit*) tujuan bersama (*common purpose*). Tujuan dari adanya koordinasi adalah untuk menjamin kesatuan tindakan, kesatuan usaha, keselarasan hubungan, penyesuaian, dan kesinambungan antar berbagai bagian organisasi, dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan tujuan organisasi.³

Menurut arahnya koordinasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu koordinasi vertical dan koordinasi horizontal:⁴

- 1) Koordinasi vertical, adalah tindakan atau kegiatan penyatuan/pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit/satuan-satuan kerja yang langsung ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Koordinasi horizontal, dibedakan menjadi dua, yaitu *interdisciplinary* dan *interrelated*.
 - a. Koordinasi *interdisciplinary*, yaitu koordinasi dalam rangka mengarahkan/menyatukan tindakan untuk mewujudkan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain, baik secara internal maupun secara eksternal pada unit-unit yang mempunyai tugas yang sama.
 - b. Koordinasi *interrelated*, yaitu koordinasi antar badan, instansi/lembaga yang fungsinya satu sama lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara internal maupun eksternal.

³ James D Mooney dalam Inu Kencana Syafii, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT Bumi Aksara : Jakarta, hal 42

⁴ Soekarno K, 1975. *Dasar-Dasar Management*. Telaga Bening: Medan, hal 53-54

c. Pengawasan

Menurut Soewarno handayadiningrat pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.⁵

Sementara itu George R Terry bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yakni:⁶

1. Mengukur hasil pekerjaan.
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan)
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau. Dalam mengumpulkan data mengenai penelitian ini, dilakukan wawancara dengan narasumber (*informan*) yang berkompeten dan memahami persoalan yang diajukan. Selain itu dalam pengumpulan data juga dilakukan analisis terhadap laporan-laporan yang sifatnya dokumenter dan analisis pemberitaan media. Setelah seluruh data terkumpul dilakukan analisis terhadap data dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan geografis Provinsi Riau sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sentra perekonomian sesuai dengan visi Riau 2020 menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara. Oleh karena posisi strategis Riau itu, Riau menjadi gerbang perdagangan internasional dan industri dengan berbagai skala. Selain itu,

⁵ Suwarno Hadayaningrat. 1996. *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung: Jakarta, hal 143

⁶ George R Terry dalam Winardi. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Raja Grafindo: Jakarta, hal 397

Riau juga kaya akan sumberdaya alam yang potensial untuk dikelola demi kesejahteraan masyarakat Riau. Untuk mengelola kekayaan itu maka diperlukan investasi baik dalam skala besar maupun kecil, investasi dari dalam maupun luar negeri, investasi pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah diberikan tugas untuk melakukan promosi beragam kekayaan alam itu dengan harapan lahir investasi yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di Provinsi Riau.

Berkaitan dengan itu, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah melaksanakan tugas di bidang investasi dan promosi potensi daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008. Adapun tugas pokok BPMPD meliputi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi Daerah.
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan perencanaan promosi seluruh potensi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan di bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah.
- d. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah
- f. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
- g. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
- h. Melaksanakan pelatihan dibidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas itu, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau merumuskan rencana strategis dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Riau. Rencana strategis itu disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada sehingga

pencapaian target terhadap rencana strategis itu lebih realistis. Dalam melaksanakan tugas di bidang investasi dan promosi potensi daerah itu, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mengalami hambatan-hambatan yaitu;

1) Minim Sumber Daya Manusia Aparatur

Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia aparatur ini berikut kondisi pegawai Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau Tahun 2011:

Tabel 3.2 Keadaan Pegawai Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2011

No.	Uraian Jabatan	Jumlah Pegawai
1	S 2	7
2	S 1	12
3	D III/Sarjana Muda	5
4	SLTA	34
5	SLTP	3
6	SD	1
	Jumlah	62

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau tahun 2011

Pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA tidak bisa diandalkan dalam melaksanakan arah kebijakan, tamatan SLTA lebih banyak ditempatkan sebagai tenaga administrasi. Sedangkan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) membutuhkan pegawai yang lebih banyak memahami wilayah teknis dan eksekusi kebijakan. Akibatnya tentu saja kebijakan dalam bidang investasi dan promosi tidak berjalan dengan baik.

2) Keterbatasan Anggaran

Selain faktor sumber daya manusia, faktor klasik berikutnya adalah masalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran menyebabkan program-program yang telah dicanangkan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Adapun program-program yang tidak berjalan dikarenakan minimnya anggaran pada tahun 2010 dan tahun 2011 adalah:

- a) Mengikuti kegiatan expo ritel dan industri kreatif di China tahun 2010.

- b) Mempromosikan potensi daerah dan expo potensi daerah di Korea Selatan tahun 2010.
- c) Pemetaan potensi dan promosi potensi daerah dalam bentuk iklan-iklan layanan publik di media televisi nasional sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa daerah lain di Indonesia.
- d) Program perumusan kebijakan strategis daerah dalam bidang investasi tahun 2011.

Anggaran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) mayoritas diserap untuk belanja langsung/belanja pegawai (lihat bab 2), sedangkan untuk belanja kegiatan atau belanja pembangunan lebih sedikit.⁷ Besarnya belanja langsung tersebut justru disebabkan oleh banyaknya jumlah pegawai dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai. Selain itu, penyerapan anggaran pada belanja langsung juga banyak pada aspek yang tidak potensial seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), biaya perawatan kantor dan pembelian peralatan kantor lainnya. Sementara itu untuk belanja kegiatan seperti kegiatan expo, pemetaan potensi, pendidikan pelatihan di bidang investasi, iklan atau promosi potensi daerah sangat sedikit.⁸ Untuk kegiatan-kegiatan promosi atau iklan justru yang lebih banyak ditampilkan adalah dalam bentuk baliho yang menampakkan wajah pejabat di institusi maupun pimpinan daerah serta kurang berkenaan langsung terhadap objek potensi daerah itu sendiri.⁹

Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan berbagai narasumber dapat diketahui bahwa keterbatasan anggaran pada tahun 2011 salah satunya disebabkan oleh adanya event Pekan Olahraga Nasional (PON) XIII di Provinsi Riau. Dalam rangka mensukseskan event itu, Pemerintah Provinsi Riau memperketat anggaran untuk lembaga teknis daerah termasuk BPMPD dan mengalokasikan anggaran pada pembangunan venue PON.

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau tanggal 26 September 2012.

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau tanggal 26 September 2012.

⁹ *Ibid.*,

3) Koordinasi Antar Institusi

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau adalah minimnya koordinasi antar institusi baik secara horizontal maupun vertikal. Koordinasi antar institusi secara horizontal maksudnya adalah koordinasi BPMPD dengan lembaga teknis lainnya di level Provinsi misalnya dengan Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi dan lain-lain. Kurangnya koordinasi itu menyebabkan kegiatan promosi potensi daerah misalnya potensi bidang perkebunan maupun bidang pertambangan tidak berjalan dengan baik. Kondisi potensi daerah tentu saja lebih diketahui oleh masing-masing lembaga teknis, dengan kurangnya koordinasi menyebabkan data potensi daerah menjadi tidak valid.

Selain kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis daerah yang lain secara horizontal, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) juga minim koordinasi dengan lembaga teknis di Kabupaten/Kota. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis di Kabupaten/Kota menyebabkan informasi mengenai potensi daerah di Kabupaten/Kota menjadi minim. Sedangkan kegiatan investasi pada dasarnya berada di Kabupaten/Kota.

4) Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi

Promosi dan penyebaran informasi potensi daerah tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi dan sistem informasi. Dalam dunia modern, teknologi dan sistem informasi menempati peran sentral dalam persebaran informasi termasuk persebaran informasi mengenai potensi daerah. Teknologi dan sistem informasi yang modern meninggalkan cara konvensional sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Dalam kaitan dengan peningkatan investasi dan promosi potensi daerah, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau juga menerapkan teknologi dan sistem informasi dalam menyebarkan informasi mengenai potensi daerah Riau dan peluang investasi di Riau. Akan tetapi penerapan teknologi dan sistem informasi modern itu belum optimal yang disebabkan oleh keterbatasan sarana teknologi dan aparatur yang ahli dalam persebaran informasi.

Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan promosi potensi daerah yang merupakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau serta merujuk pada hambatan-hambatan pelaksanaan tugas sebagaimana hasil pengamatan dan analisis di atas, maka hambatan pelaksanaan tugas BPMPD dalam peningkatan investasi dan promosi daerah dapat ditinjau dari Model George Edward III yang mengatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan (bidang investasi dan promosi potensi daerah), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam upaya mengatasi hambatan dalam meningkatkan investasi di Provinsi Riau tahun 2009-2011, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau membuat indikator pencapaian kinerja sebagai tolok ukur tercapainya rencana strategis yang sudah ditetapkan. Selain membuat indikator kinerja di atas, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau juga menerapkan beberapa kebijakan dalam usaha peningkatan investasi dan promosi potensi Provinsi Riau. Adapun upaya itu adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang Penanaman Modal
2. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif
4. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA
5. Pengumpulan Data Investasi Non Fasilitas
6. Updating Buku Profil Daerah, Proposal Proyek Investasi dan Leaflet/ Brosur Proyek Investasi
7. Updating Website Pendukung Investasi
8. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah.
9. Promosi Luar Negeri
10. Promosi Dalam Negeri
11. Peningkatan Kapasitas Promosi
12. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah

Selain upaya-upaya institusional di atas, untuk mengatasi hambatan yang bersifat internal dalam Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, maka BPMPD Riau melakukan hal-hal yakni, Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah, Pelatihan Spipise Untuk Pelaksanaan Program Terpadu Sistem Promosi (PTSP).

Penutup

Selain masalah teknis terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh BPMPD yaitu masih adanya *image* negatif dari kalangan investor asing terhadap kondisi kamtibmas dan sosial politik di Indonesia, yang mengakibatkan kehati-hatian kalangan investor asing untuk melakukan kegiatan investasi, disamping masih adanya *image* terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang di beberapa daerah dapat menimbulkan kesulitan baru dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha. Upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dilanjutkannya kebijakan dan operasionalisasi upaya-upaya peningkatan penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi, serta upaya peningkatan usaha ekonomi daerah.

Daftar Bacaan

George R Terry dalam Winardi. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Raja Grafindo: Jakarta

James D Mooney dalam Inu Kencana Syafie, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT Bumi Aksara : Jakarta

Soekarno K, 1975. *Dasar-Dasar Management*. Telaga Bening: Medan

Suwarno Hadayaningrat. 1996. *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung: Jakarta

Thomas R. Dye dalam Affan Sulaeman. 1998. *Diktat Kebijakan Pemerintah*, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad – IIP: Bandung